

**PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA TANGGUH BENCANA
DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS DI DESA PASAWAHAN
KECAMATAN TAROGONG KALER)**

¹Ahmad Buchari, ²Meilanny Budiarti Santoso, ³Nina Marlina

¹Departemen Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

E-mail: ahmad_buchari@yahoo.com

²Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

E-mail: meilannybudiarti13@gmail.com

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

E-mail: nina13004@mail.unpad.ac.id

Abstract

In a bid to realize a disaster-resilient village with capacity to manage disasters, it needs to develop a sufficient institutional capacity. Garut Regency, being one of disaster 'minimarkets' in Indonesia, should be capable of building the institutional capacity of Disaster-Resilient Village for the communities at village level to be capable of managing potential disasters and minimizing losses incurred by disasters. Enhancing disaster-resilient village capacity needs various measures of improving disaster-resilient village capacity in handling disasters from emergence pre-responding stage to post-disaster actions. The objective of the present research was to describe and analyze the institutional capacity building of disaster-resilient village in Pasawahan Village, Tagorong Kaler Sub-district, Garut Regency, as well as its supporting and inhibiting factors. The research method used was a qualitative method with descriptive approach. The focus of research was institutional capacity building of disaster-resilient village in Pasawahan Village, Tagorong Kaler Sub-district, Garut Regency. The research result was that institutional capacity building of disaster-resilient village in Pasawahan Village, Tagorong Kaler Sub-district, Garut Regency has not been optimal yet, due to some barriers, among other, the lack of activities of empowering local community such as disaster-related education and training, minimum awareness of community on the importance of building self-capacity in handling disasters, and the lack of supporting facility. The suggestion of the research was that the government of Garut Regency should provide more supports to Pasawahan Village, both in management and facility, in order to accelerate the realization of transforming Pasawahan Village into a disaster-resilient village. Moreover, the village should be capable of building community awareness of the importance of building self-capacity in handling disasters.

Keywords: Capacity Building, Institutional, Disaster-Resilient

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana yang memiliki kapabilitas dalam manajemen bencana, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan yang memadai. Kabupaten Garut sebagai salah satu "minimarket" bencana di Indonesia harus mampu membangun kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana agar masyarakat ditingkat desa mampu melakukan manajemen bencana dalam menghadapi potensi bencana serta mampu untuk meminimalisasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana mengandung pemahaman tentang berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan destana dalam mengelola bencana dari tahapan pra-tanggap darurat hingga tindakan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Pada Desa Pasawahan - 49

Kecamatan Tarogong Kaler)

Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina

mendeskripsikan serta menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yakni pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarorong Kaler Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum maksimal berdasarkan hambatannya yakni belum adanya kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal seperti pendidikan dan pelatihan kebencanaan, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun kapasitas diri dalam menghadapi bencana serta belum adanya sarana pendukung. Adapun saran dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Garut memberikan dukungan yang lebih kepada desa Pasawahan baik dalam segi manajemen dan sarana guna mempercepat terciptanya desa Pasawahan yang dijadikan salah satu Desa Tangguh Bencana. Kemudian juga pihak desa harus mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap

Kata Kunci: *Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan, Desa Tangguh Bencana*

PENDAHULUAN

Kabupaten Garut merupakan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi bencana paling tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Garut dikelilingi oleh pegunungan serta berada di wilayah pantai selatan Jawa. Adapun berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRB) tahun 2011, menempatkan Kabupaten Garut sebagai Kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana tinggi pada posisi pertama dengan skor 139 di tingkat nasional. Beberapa bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Garut adalah kekeringan dan tanah longsor serta kebakaran hutan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut tercatat hingga bulan April 2015 terdapat 42 kejadian yang meliputi bencana tanah longsor terjadi sebanyak 29 kejadian, angin puting beliung sebanyak 8 kejadian dan banjir sebanyak 5 kejadian. Kondisi Kabupaten Garut demikian menjadikannya sebagai “mini market” bencana di Jawa Barat.

Berdasarkan data dan fakta tersebut maka masyarakat Kabupaten Garut harus berupaya hidup selaras dengan berbagai potensi bencana yang ada. Artinya, bencana yang berasal atas kehendak alam tidak mampu dihindari oleh masyarakat, namun masyarakat harus mampu mempersiapkan diri dengan membangun kapasitas dalam melakukan manajemen bencana untuk mengurangi resiko dari potensi bencana.

Tabel 1. Data Kerugian Bencana Alam Kabupaten Garut Tahun 2016

| Jenis Kerugian | Jumlah Kerugian |
|------------------------|-----------------|
| Korban Meninggal | 34 Jiwa |
| Korban Hilang | 19 jiwa |
| Korban Luka-luka | 35 jiwa |
| Korban Mengungsi | 6.361 jiwa |
| Kerusakan rumah berat | 575 unit |
| Kerusakan rumah sedang | 239 unit |

| | |
|------------------------|----------|
| Kerusakan rumah ringan | 970 unit |
| Fasilitas Pendidikan | 49 unit |
| Fasilitas Peribadatan | 15 unit |
| Fasilitas Kesehatan | 2 unit |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), 2016

Tabel diatas memperlihatkan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat resiko yang ditimbulkan bencana. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sangat diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat terutama masyarakat desa agar mampu melakukan manajemen bencana. Membangun kapasitas ini tentu bukan hanya dititik beratkan pada lembaga pemerintah yang menangani koordinasi kebencanaan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Semua elemen masyarakat terutama masyarakat di tingkat desa harus memiliki kapasitas dalam manajemen bencana untuk memperkecil resiko potensi bencana.

Untuk menyikapi urgensi dari kebutuhan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan manajemen bencana, pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional telah membuat strategi melalui sebuah kebijakan agar pengurangan resiko bencana dilakukan berbasis komunitas. Strategi tersebut yaitu membentuk Desa Tangguh Bencana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012. Dikutip dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Desa Tangguh Bencana merupakan desa yang memiliki kapasitas untuk mengenali potensi bencana, mengurangi potensi bencana serta mampu mengorganisir semua elemen dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kebencanaan. Adapun bentuk kapasitas yang dimiliki oleh Desa Tangguh Bencana yaitu terwujud dengan adanya perencanaan pembangunan yang didalamnya mengandung berbagai upaya pencegahan dari potensi bencana, kesiapsiagaan serta pengurangan resiko bencana pasca bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2012 tujuan dari pembentukan Destana adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli

Konsep Destana ini mengamanatkan bahwa seluruh komponen Destana yang terdiri dari pemerintah desa, masyarakat desa serta forum PRB harus mampu melakukan manajemen bencana untuk memperkecil resiko dari potensi bencana. Kapasitas untuk melakukan manajemen bencana ini meliputi kapasitas untuk melakukan manajemen bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kapasitas Destana yang diperlukan untuk melakukan manajemen bencana meliputi kapasitas dari aspek sikap dan pengetahuan.

Berdasarkan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Kabupaten Garut maka dibentuklah Desa Tangguh Bencana sebanyak 6 desa. Keenam desa yang dibentuk sebagai Destana adalah Desa Salah satu desa yang dibentuk Destana adalah Desa Pasawahan. Hal tersebut dikarenakan Desa Pasawahan merupakan desa yang sangat dekat dengan potensi bencana gunung guntur yang merupakan gunung api aktif. Mengingat Desa Pasawahan merupakan desa yang rawan terkena potensi bencana gunung guntur maka sangat penting untuk meningkatkan kapasitas Destana. Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Pasawahan yang merupakan salah satu desa tangguh bencana yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Garut sudah memiliki forum pengurangan resiko bencana (FPRB) yang terdiri dari anggota PKK, anggota karang taruna, rt, rw, dan masyarakat lainnya. Kegiatan pengembangan kapasitas Destana yang sudah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi potensi bencana, analisis kajian resiko bencana, pemetaan potensi bencana, rencana penanggulangan bencana, pendidikan dan pelatihan simulasi tanggap bencana. Kegiatan tersebut diikuti oleh FPRB yang melibatkan 20 orang anggota aktif tanpa melibatkan masyarakat non FPRB. Konsep Destana yang sangat penting direalisasikan belum menjadi prioritas pembangunan desa berdasarkan observasi awal peneliti kepada pihak pemerintah desa Pasawahan. Kebijakan yang mengatur Destana di level desa masih dalam tahap pembahasan FPRB dan belum diajukan pada saat Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Artinya aturan lanjut mengenai Destana belum disahkan menjadi peraturan desa (perdes). Berdasarkan observasi awal peneliti, maka muncullah pertanyaan penelitian, bagaimana pengembangan kapasitas Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan)?

KAJIAN LITERATUR

A. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building)

Merilee S.Grindle (1997) dalam jurnal *Analysis Of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City, Indonesia, 2014* mengungkapkan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi. Adapun menurut Grindle, untuk mengukur kapasitas kelembagaan apat dilihat dari 3 dimensi. Tiga dimensi tersebut yaitu pengembangan sumber daya manusia (HRD), memperkuat organisasi serta reformasi kelembagaan(Grindle, 1997).Adapun matriks dimensi kapasitas kelembagaan menurut Grindle (1997) sebagai berikut:

Tabel 2. Dimensions and Focus of Capacity-Building Initiatives

| Dimension | Focus | Types of Activities |
|------------------------------|---|--|
| Human Resource Development | Supply of professional and technical personnel | Training, condition of work, recruitment |
| Organizational Strengthening | Management system to improve performance of specific tasks and functions; microstructures | Incentive systems, utilization of personnel, leadership, organizational culture, communications, managerial structures |
| Institutional Reform | Institutions and systems; macrostructures | Policy and legal change, constitutional reform |

Sumber: European Journal of Research in Social Sciences, Vol. 2, No. 2, 2014, Analysis Of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City, Indonesia.

Berdasarkan tabel diatas, untuk mengukur kapasitas pengembangan kelembagaan pertama dapat diintervensi dari sumber daya manusia secara terpadu meliputi upaya pelatihan, memperbaiki kondisi kerja, dan rekrutmen yang tepat terintegrasi. Kemudian dalam dimensi penguatan organisasi terpadu meliputi sistem insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajer terintegrasi. Sedangkan dalam dimensi reformasi kelembagaan terpadu mencakup sistem kelembagaan, dan struktur makro organisasi. Artinya untuk dapat membangun kapasitas kelembagaan, tiga aspek tersebut memegang peranan penting serta ketiga dimensi tersebut harus diupayakan dapat berjalan secara terpadu dalam suatu lembaga. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan lembaga yang mampu mengembangkan kapasitasnya dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Selain itu menurut Riyadi (2006:14) mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas mempunyai dimensi dan tingkatan berikut:

1. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu
2. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi
3. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada system

Merujuk pada pendapat Riyadi tersebut, bahwa pengembangan kapasitas suatu lembaga harus dimulai dari pengembangan kapasitas inidividunya, kapasitas secara makro organisasi serta sistem yang digunakan dalam suatu lembaga.

Berbeda dengan pendapat Morison (2001:23), bahwa tujuan capacity building yaitu memberikan pembelajaran untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan

kemampuan untuk beradaptasi menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Tujuan pengembangan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwa pengembangan potensi sumber daya manusia mutlak diperlukan bagi setiap individu dalam organisasi supaya individu-individu memiliki kemampuan kolektif yang berkembang untuk menciptakan kinerja lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan serangkaian upaya meningkatkan segenap kemampuan seluruh elemen organisasi mencakup sumber daya manusia, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, struktur organisasi dan sistem kelembagaan yang digunakan supaya mampu berjalan secara terpadu dalam mencapai target tujuan.

B. Desa Tangguh Bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012 Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB nomor 1 Tahun 2012 Tentang). Artinya konsep yang diusung oleh BNPB ini mengharuskan semua elemen masyarakat untuk memiliki kapasitas untuk menghadapi bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan dimana seluruh elemen yang ada didalamnya termasuk organ desa/kelurahan dan seluruh masyarakat memiliki kapasitas dalam mengenali potensi dan ancaman bencana di wilayahnya serta mampu mengorganisir seluruh sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan risiko bencana. Kapasitas masyarakat dan seluruh elemen di desa tangguh bencana sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut yakni kapasitas masyarakat berupa kemampuan-kemampuan dalam merencanakan pembangunan desa yang didalamnya mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana serta upaya peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Perlu digarisbawahi bahwa kapasitas yang harus dimiliki oleh masyarakat dan semua elemen dalam desa tangguh bencana bukan hanya sebatas kapasitas berupa tindakan mampu menghadapi bencana namun juga secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan hingga pasca bencana.

Dalam konsep desa tangguh bencana, semua elemen Destana harus memiliki kemampuan yang sama dalam seluruh aspek pembangunan desa dalam bidang kebencanaan. Bahkan dalam peraturan kepala BNPB nomor 1 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana yang berbasis komunitas yang digagas kedalam strategi desa tangguh bencana ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kapasitas dirinya dalam bidang kebencanaan. Untuk dapat melakukan manajemen bencana, maka Destana harus memiliki kapasitas secara teoretis dan praktis dalam melakukan manajemen bencana agar resiko bencana dapat diminimalisasi. Kapasitas kelembagaan Destana dalam melakukan manajemen bencana merupakan kolaborasi dari semua sumberdaya dan potensi kekuatan yang ada dalam individu masyarakat, kelompok, atau organisasi yang dapat mendukung upaya mengurangi risiko bencana. Kapasitas Destana dalam manajemen bencana meliputi kapasitas Destana untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko bencana, atau upaya untuk segera pulih dari bencana dilihat dari aspek sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan

lingkungan. Kapasitas tersebut idealnya dapat dioptimalkan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.

Agarkonsep desa tangguh bencana berjalan selaras dalam pembangunan desa maka konsep-konsep desa tangguh bencana idealnya diintegrasikan kedalam rencana pembangunan desa dan menjadi prioritas pembangunan desa. Sebagai bentuk integrasi pola-pola desa tangguh bencana tersebut maka konsep desa tangguh bencana ini harus dijabarkan kedalam poin-poin misi pembangunan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang nanti outputnya adalah menghasilkan Destana dimana semua elemennya aktif dalam semua upaya manajemen bencana baik pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Setiap elemen Destana harus memiliki kemampuan yang sama dalam pembangunan desa yang berkaitan dengan kebencanaan dari mulai tahapan perencanaan hingga menghasilkan output yang diharapkan. Untuk menjadi sebuah Destana, tentu bukan hanya anggota forum PRB dan tim relawan yang harus memiliki kapasitas dalam manajemen bencana tetapi semua elemen masyarakat di desa harus mampu memiliki kemampuan tersebut agar semua elemen desa tangguh bencana memiliki kapasitas yang sama dalam melakukan manajemen bencana.

Penelitian mengenai Desa Tangguh Bencana di Garut belum banyak dilakukan berdasarkan hasil penelusuran peneliti, karena itulah peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan penelitian ini. Adapun sumber acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Balebu (2010) yang berjudul “Pengurangan Risiko Bencana berbasis Pengembangan Institusi dan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Poso”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penguranganrisiko bencana dilakukan melalui kegiatanpengurangan kerentanan dan penguatan kapasitasinstitusi berdasarkan lima sasaran strategi prioritas, yaitu: meningkatkanperan serta masyarakat dalam memelihara lingkungan dengan kearifanbudaya lokal, peningkatan perekonomian masyarakat melalui pelatihandiverifikasi ekonomi; peningkatan kesadaran melalui pendidikan usia dinimaupun pelatihan untuk kesiapan menghadapi banjir, peningkatankapasitas masyarakat melalui KPLH sebagai kerentanan lingkungan;pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat untuk kesiapan menghadapibencana dan memperkuat kapasitas. Masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tinggi mengenai bencanabanjir, namun dari aspek kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakatmasih sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang peraturan kebencanaan serta sosialisasi dan pelatihan masih sangat rendah dan belum terbentuknya suatu lembaga khusus yang menanganimasalah banjir.

Selanjutnya, Vektor (2014) dalam tesisnya yang berjudul Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Bantul menyimpulkan bahwa kegiatan pengurangan risiko bencana Tsunami di Kabupaten Bantul yang sudah dilakukan antara lain dalam bentuk kegiatan penguatankelembagaan, pengkajian risiko, perencanaan, sosialilasi, pendidikan danpelatihan, simulasi tanggap bencana, serta penyiapan sarana dan prasarana evakuasi. Salah satu upaya yang dilakukan dan penting adalah penguatan kelembagaan, maka dari itu peneliti berasumsi bahwa sumber referensi ini penting digunakan sebagai sumber referensi mengingat belum ada sumber lain yang lokus penelitiannya tepat di Kabupaten Garut. Kedua sumber referensi ini menjadi acuan peneliti karena Bantul merupakan salah satu daerah rawan bencana dengan tingkat kerawanan tinggi yang hampir sama seperti halnya Kabupaten Garut. Selain itu, peneliti menjadikan kedua penelitian diatas karena keduanya membahas pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan desa yang tangguh dari bencana serta hasil dari pengembangan kapasitas kelembagaan yang

dapat memberikan dampak positif terhadap ketangguhan masyarakat dalam melakukan manajemen bencana.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena Kabupaten Garut merupakan “minimarket bencana” yang menduduki kategori daerah rawan bencana alam peringkat 1 tingkat nasional pada tahun 2011. Dan karena keberadaan Desa Tangguh Bencana Pasawahan masih relatif baru, maka sangat penting dikaji untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penelitian berdasarkan hal-hal yang masih dianggap kurang optimal dari penyelenggaraan Desa Tangguh Bencana Pasawahan agar Destana Pasawahan lebih tangguh secara fisik dan mentalnya dalam manajemen bencana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dengan menggunakan metode ini peneliti dapat mengkaji informasi dari informan yang memiliki data, informasi, otoritas atau keterkaitan lain dengan pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana Pasawahan. Selain itu juga dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dari kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan Destana Pasawahan dengan melihat fenomena yang ada melalui informan yang diperoleh agar dapat dideskripsikan secara menyeluruh, dan rinci sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Adapun lokasi penelitian di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Fokus penelitian adalah pengembangan kapasitas Desa Tangguh Bencana.

Data primer penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan Destana Pasawahan yaitu Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), pemerintah desa Pasawahan, dan masyarakat non FPRB. Data sekunder diperoleh dari kegiatan dokumentasi dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen peraturan yang berkaitan dengan Desa Tangguh Bencana dan dokumen lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:246) yakni meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Teknik penentuan informan yang dipilih yaitu menggunakan teknik purposive yaitu mengambil sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap mapan mengetahui dan menguasai berbagai informasi yang diharapkan peneliti. Penentuan informan dari pihak yang dianggap paling mengetahui informasi yang diteliti untuk memudahkan peneliti dalam menggali informasi yang ingin diteliti. Teknik ini sesuai untuk digunakan pada penelitian yang tidak digeneralisasikan. Informan penelitian yang dipilih yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan dianggap memiliki informasi dan menguasai informasi yang banyak mengenai Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Destana Pasawahan; informan dianggap terlibat langsung dalam proses pengembangan Kapasitas Kelembagaan Destana Pasawahan dan informan memiliki waktu yang memadai untuk dimintai wawancara untuk menggali informasi oleh peneliti yaitu Adapun informan yang akan dimintai informasinya oleh peneliti adalah pihak yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan Destana Pasawahan. Penetapan informan dilakukan berdasarkan pengalaman dan pemahaman informan atas objek yang diteliti. Hal tersebut

dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua pihak memahami fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun informan-informan yang dimintai informasinya adalah Kepala Desa /Sekretaris Desa Pasawahan, Sekretaris FPRB, Anggota FPRB, RT, RW, dan perwakilan masyarakat tiap dusun dan BPBD Kabupaten Garut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler)

Pengembangan SDM

- Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengenali potensi bencana berdasarkan letak Desa Pasawahan yang potensi bencananya adalah meletusnya gunung guntur serta kebakaran hutan di hutan sekitar gunung guntur. Pendidikan dan pelatihan ini diberikan oleh BPBD kabupaten Garut kepada forum PRB yang didalamnya terdapat tim relawan. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh BPBD baru dilaksanakan 2 kali sejak dibentuknya Desa Tangguh Bencana di Desa Pasawahan tahun 2015. Pengembangan kapasitas SDM nya masih sangat sederhana jika melihat desa Pasawahan memiliki potensi bencana yang berbahaya.
- Kegiatan simulasi tanggap bencana bagi tim relawan dan dihadiri oleh sebagian kecil masyarakat diluar tim relawan. Simulasi dilakukan satu kali dan diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Garut serta difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam simulasi ini tim relawan diuji untuk melakukan tindakan-tindakan pada saat tanggap darurat. Simulasi dilakukan agar tim relawan mampu menjadi leader dalam tanggap darurat serta pasca bencana.
- Masyarakat non FPRB diberikan sosialisasi mengenai kebencanaan yang diadakan secara formal dan difasilitasi oleh desa. Sosialisasi kebencanaan tersebut meliputi upaya pengenalan potensi dan resiko bencana disekitar Desa Pasawahan, kemudian mengenalkan peta jalur evakuasi saat bencana serta teknik-teknik penyelamatan dasar pertama bagi masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan satu kali sejak pembentukan Destana di Desa Pasawahan. Namun pada saat sosialisasi tidak semua masyarakat ikut sehingga informasi mengenai kebencanaan ini belum didapatkan oleh semua masyarakat. Hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang letak rumahnya cukup jauh dari desa dan dekat dengan gunung guntur. Menurut penuturan informan, dirinya tidak mengetahui ada sosialisasi kebencanaan dan tidak tahu mengenai destana. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi sosialisasi yang dilakukan belum cukup tersebar kepada semua masyarakat.
- Adanya kegiatan sosialisasi informal dari tim relawan FPRB kepada masyarakat diluar tim relawan sebagai inisiatif tim relawan mengingat sosialisasi kebencanaan dan destana di desa masih belum efektif melibatkan partisipasi masyarakat.

Sosialisasi informal ini dilakukan oleh kaum perempuan PKK. Sosialisasi informal dilakukan dari mulut ke mulut ataupun disampaikan dalam acara silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya inisiatif ini tentu sedikitnya mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Namun upaya ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya lain agar proses sosialisasi dan transfer informasi kepada masyarakat lebih efektif.

Penguatan Kapasitas Organisasi

- Dokumen usulan yang disusun oleh FPRB mengenai Destana belum disahkan menjadi peraturan desa (perdes) sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai Destana Pasawahan belum ada.
- Sarana sekretariat bagi FPRB di desa belum ada dikarenakan desa belum memiliki dana yang cukup maka yang disediakan hanya sekretariat dengan ruangan sederhana dari ruangan desa yang kosong. Hal ini disebutkan oleh informan Sekretaris Desa bahwa saat ini pihak desa belum dapat melakukan banyak hal dan hanya berperan sebagai fasilitator bagi tim relawan. Bentuk dukungan finansial dari pihak desa memang masih rendah namun sebagai salah satu bentuk dukungan desa yakni desa menyediakan satu ruangan dikantor desa sebagai sekretariat bagi tim relawan FPRB.
- Membangun sinergitas dengan PKK, Karang Taruna dan tokoh pengusaha di desa. Menurut penuturan informan sekretaris FPRB menyebutkan bahwa desa menjalin komunikasi yang cukup baik dengan pelibatan pra tokoh dalam hal penyampaian informasi mengenai kebencanaan dan destana. Tujuannya tidak lain untuk menjaring partisipasi supaya semua stakeholder dapat turut serta mendukung eksistensi destana di Desa Pasawahan. Dengan begitu, diharapkan akan terbangun kesadaran bencana dan pentingnya destana sebagai satu kebutuhan masyarakat.
- Desa mengelola beberapa potensi tokoh masyarakat seperti misalnya menjalin hubungan yang harmonis untuk menjaring partisipasi tokoh pengusaha di desa dalam membangun desa tangguh bencana. Dengan adanya harmonisasi desa dengan tokoh pengusaha di desa maka tokoh pengusaha di desa mulai berkontribusi aktif misalnya dengan menghadiri musyawarah forum PRB dan juga memberikan bantuan sarana transportasi berupa mobil jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Potensi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar tokoh-tokoh masyarakat di desa mampu berpartisipasi aktif menggali dan meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi bencana.
- Struktur organisasi FPRB sudah ada namun secara struktural dengan pemerintah desa, posisi kelembagaan FPRB belum setara dengan lembaga lain yang berada dibawah naungan pemerintah desa sehingga Destana Pasawahan belum cukup kuat apabila dilihat dari struktur organisasinya. Belum adanya struktur organisasi Destana Pasawahan yang formal berakibat pada belum adanya pembagian kerja

yang jelas dalam pelaksanaan Destana. Adapun kegiatan Destana yang selama ini sudah dilakukan belum berdasarkan struktur lembaga Destana yang formal.

- Aturan lebih lanjut mengenai pembentukan Destana secara formal belum dalam dilegalkan dalam bentuk peraturan desa, rancangan peraturan desa masih dalam pembahasan dan belum dilegalkan. Meski demikian, FPRB sebagai garda terdepan mengenai materi Destana, mereka telah menghasilkan output berupa peta potensi bencana, rekam data masyarakat beserta harta bendanya, rencana aksi, peta jalur evakuasi ketika terjadi bencana, alternatif rencana, dan rencana kontingensi. Hal tersebut didapatkan dari pembinaan FPRB oleh BPBD Kabupaten Garut. Sayangnya kemampuan ini belum di transfer kepada seluruh masyarakat Desa Pasawahan karena RPFb sendiri perlu pendampingan dari pihak desa untuk bergerak menyampaikan knowledge kebencanaan yang dimilikinya kepada masyarakat diluar FPRB. **Namun pihak desa pun belum bisa menindaklanjuti hal tersebut karena personil pemerintah desa pun belum sepenuhnya memiliki kesadaran mengenai urgensi Destana.**

Strategi Reformasi Kelembagaan

- Adanya amanat Destana ini sudah direspon cukup baik oleh desa Pasawahan dengan adanya pembentukan Forum PRB. Forum PRB ini dilegalkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa dan telah menghasilkan beberapa output seperti rencana-rencana penyelamatan sejak pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana. Namun dalam struktur organisasi desa sendiri belum ada seksi yang secara khusus memfokuskan pada perencanaan pembangunan yang pro terhadap bencana. Dengan adanya Forum PRB ini secara struktural posisinya sejajar dengan organ desa lainnya seperti PKK dan Karang Taruna.
- Visi misi desa Pasawahan belum memfokuskannya pada upaya-upaya membangun desa tangguh bencana dimana dalam RPJMDes belum ada konsep-konsep destana yang secara utuh dimasukkan kedalam proses pembangunan di desa.
- Dalam proses Musrenbangdes menurut Sekretaris Desa belum ada usulan baik dari aparat desa maupun masyarakat mengenai program-program yang lebih fokus berorientasi pada konsep desa tangguh bencana. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kapasitas diri dalam mengelola bencana masih sangat rendah. Pihak desa dalam hal selaku leading sector dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa pun belum mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai urgensi desa tangguh bencana.

KESIMPULAN

Hasil penelitiannya adalah pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya pengetahuan masyarakat Pasawahan terkait kebencanaan karena selama ini pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BPBD hanya

diberikan untuk relawan FPRB dan belum ada kegiatan serupa untuk masyarakat non FPRB. Belum terintegrasinya konsep destana kedalam RPJMDes juga menyebabkan belum terfokusnya program pembangunan desa yang berorientasi desa tangguh bencana. Kemudian keterbatasan dana baik di desa maupun di pemerintah daerah dalam hal BPBD Kabupaten Garut juga menjadi salah satu kendala belum terlaksananya pendidikan dan pelatihan khusus untuk masyarakat diluar tim relawan. Selain itu juga kondisi masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa pengembangan kapasitas diri untuk menghadapi bencana adalah penting. Dalam hal ini Pemerintah desa Pasawahan belum menginisiasi masyarakat dan lembaga dibawah naungan desa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengembangan kapasitas diri dalam menghadapi bencana. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpadunya konsep desa tangguh bencana kedalam proses pembangunan desa

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan saran bagi Destana Pasawahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pasawahan:

- Dalam pelaksanaan program pembangunan desa, konsep-konsep Destana idealnya diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Desa baik jangka menengah dan jangka panjang.
- Membahas lebih lanjut mengenai pengaturan Desatana Pasawahan dan melegalkannya dalam bentuk peraturan desa (perdes) sebagai acuan yang legal pengaturan Destana di Desa Pasawahan.
- Memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat yang tidak tergabung dalam FPRB untuk mengetahui proses pembuatan peta resiko bencana, peta jalur evakuasi, rencana aksi, rencana penanggulangan bencana agar semua elemen destana Pasawahan mmemiliki pemahaman yang sama mengenai destana dan hal yang berkaitan dengan destana.
- Desa dapat memberikan fasilitasi bagi FPRB untuk melaksanakan sosialisasi dan kegiatan lain yang bersifat pengembangan kapasitas bagi masyarakat non FPRB.

2. Forum Pengurangan Resiko Bencana

- Untuk meminimalisasi kebutuhan anggaran dari kegiatan sosialisasi dan dan simulasi tanggap darurat bagi masyarakat non FPRB, maka relawan bencana yang tergabung dalam FPRB secara sukarela menyampaikan hasil pedidikan dan pelatihan kebencanaan, sosialisasi dan pengetahuan lain yang diberikan oleh BPBD bersama-sama dengan pemerintah desa melakukan nya secara intensif. Dengan adanya kerjasama dari FPRB, pemerintah desa dan juga pemerintah desa yang merangkul masyarakat dalam manajemen bencana maka diharapkan masyarakat diluar FPRB pun akan memahami teknik-teknik sederhana dalam manajemen bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana amanah

Perka BNPB mengenai Destana bahwa diharapkan semua pihak dalam Destana memiliki tingkat kapasitas yang tinggi dalam manajemen bencana.

- Kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta simulasi tanggap darurat bagi FPRB ditingkatkan intensitasnya dan tidak hanya untuk FPRB tetapi bagi masyarakat non FPRB.
- Dapat memberikan informasi tentang urgensi integrasi konsep destana kedalam RPJMDes sehingga masyarakat non forum dapat memahami urgensinya dan dapat mengusulkan program-program pembangunan desa yang berorientasi destana sesuai prakarsa masyarakat.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana kekurangan dan kelebihan Destana Pasawahan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut. Hal tersebut berguna untuk menentukan langkah selanjutnya guna memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana MediaGroup

Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: PustakaPelajar

Riyadi, Soeprapto. 2005. Of The Loyal Government Toward Good Governance. Diakses Pada tanggal 13 September 2013 dari Pdf.

Sugiyono. 2009. Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Tesis:

Balebu, Agustin (2010) Pengurangan risiko bencana berbasis pengembangan institusi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Poso. Tesis, dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.

Vektori, Anton (2014) Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tsunami Di Kabupaten Bantul. Tesis, dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

Habibullah. (2013). Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana Dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. *Jurnal Kementerian Sosial* 18 (02).

Rulinawaty Kasmad, Alwi. (2014). Analysis Of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City. *European Journal of Research in Social Sciences* , 2 (2), 31-33.

Dari website sebuah organisasi/kementerian

Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). Info Bencana Desember 2016. Diakses tanggal 1 Agustus 2017 dari https://www.bnpb.go.id/uploads/publication/info_bencana_desember_final.pdf.